BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di era modern seperti ini Teknologi informasi sangat berkembang pesat. Komputer dan internet berupa kecepatan dan ketelitiannya sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan internet.¹

Usaha mewujudkan cita-cita hukum untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana, bukan merupakan satu - satunya cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari sarana yang dimanfaatkan sebagai fungsi kontrol masyarakat.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjad

¹ [http://www.scribd.com/doc/11654767/tinjauan - yuridis - pembuktian - cyber - crime – dalam – perspektif – hukum – positif – indonesia](http://www.scribd.com/doc/11654767/tinjauan-yuridis-pembuktian-cyber-crime-dalam-perspektif-hukum-positif-indonesia), 21 November 2020, 14.00 wib

tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi saat ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif dalam upaya perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum *Cyber*, yang diambil dari kata *Cyber Law* adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*).²

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum *cyber* digunakan dalam tulisan ini dengan dilandasi pemikiran bahwa *cyber* diidentikan dengan "Dunia Maya" untuk itu akan cukup banyak menghadapi persoalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai "maya", sesuatu yang tidak terlihat dan semu.

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan pada *cyberspace*, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan,

² <http://www.tunardy.com/pengertian-cyber-crime/> 21 November 2020, 16.00 WIB

sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak.

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *Cyber crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya.

Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (*asas legalitas*), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat di pertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP), yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal I ayat (1) KUHP

*"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada, sebelum perbuatan di lakukan."*³

³ Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Bumi Karsa, Jakarta, 2016.

Cyber crime, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi disamping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana. Akhirnya dengan melihat pentingnya persoalan membuktikan Bertolak dari dasar membenaran sebagaimana diuraikan diatas, bila dikaitkan dengan dalam *Cyber crime*, penelitian ini hendak mendeskripsikan pembahasan dalam fokus masalah hukum pembuktian terhadap *Cyber crime* dalam Hukum Pidana Indonesia.

Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, bagaimana pembuktian- Pembuktian dalam *cyber crime* cukup sulit dilakukan. Mengingat, bahwa hukum di Indonesia yang mengatur masalah ini masih banyak ditemukan cacat hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku *Cyber crime* untuk lepas dari proses pemidanaan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*).⁴ Karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, maka idealnya kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segalanya dan setiap orang dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.

Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan dibidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya. Upaya

⁴ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

pembangunan dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. *Kodifikasi* dan *unifikasi* bidang - bidang hukum dan penyusunan perundang - undangan baru sangat dibutuhkan. Instrumen hukum baru dalam bentuk perundang - undangan sangat di butuhkan sekarang ini⁵.

Karena sangat banyak Undang – Undang yang telah ketinggalan dan tidak dapat mengikut Perundang - undangan baru ini dibutuhkan juga untuk membangun kesadaran dan pandangan masyarakat tentang tingkah lakunya. Kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor yang menyebabkan perubahan cara berpikir, cara bertindak dan cara bersikap. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Pertanyaannya apakah perubahan sikap warga masyarakat ini dianggap lazim atau menjadi suatu tindakan yang tidak lazim bahkan dapat menjadi suatu tindakan yang mengancam ketertiban sosial.

Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong dalam kejahatan sering kali memanfaatkan sarana teknologi informatika. Bentuk kejahatan yang akhir - akhir ini sedang marak dan sangat mengawatirkan adalah kejahatan penipuan lowongan kerja *online*. Kasus seperti ini diatur dalam Pasal 378 Buku II Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI

⁵ Moh. Dulkihah, *Sosiologi Kriminal*. Lp2 uin sgd bandung 2020

No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 378 KUHPidana.

Bekerja adalah harapan semua orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, membahagiakan keluarga, serta melakukan hal yang baik. Menurut pendapat penulis yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi incaran bagi sekelompok orang untuk memanfaatkan kelemahan orang lain. Masalah penipuan lowongan kerja online sedang marak di daerah Kabupaten Karawang tempat dimana Penulis meneliti. Pasalnya Karawang adalah kawasan industri besar namun fakta yang ada sebagian warga pribumi sulit mendapat pekerjaan di tanah kelahirannya sendiri. Hal ini yang menjadi pemicu banyak sekelompok orang yang tergiur dengan lowongan pekerjaan yang tidak pasti karena keinginan bekerja mereka yang sangat tinggi sehingga jalur instan ditempuh.

Pemicu kedua, banyak oknum yang sangat tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi seperti ini, tentunya mereka memberikan informasi lowongan pekerjaan palsu kepada orang yang tidak dikenal agar identitas pelaku tidak mudah untuk dilacak. Pelaku memanfaatkan media internet Facebook, Website dan Whatsapp untuk berinteraksi dengan korban, berbagai cara mereka lakukan agar korban terkena tipu dayanya.

Dalam Penelitian ini terdapat salah satu contoh kasus mengenai kejahatan penipuan lowongan kerja *online* yang terjadi di daerah kabupaten karawang, ialah sebagai berikut :

Seorang laki – laki berusia 24 tahun berinisial AL teripu pada saat mencari lowongan kerja dia mendapatkan informasi lowongan kerja di jejaring media sosial facebook, pelaku berinsial IW menawarkan bisa memasukan kerja di perusahaan tertentu dengan syarat membayar sejumlah uang terlebih dahulu agar bisa ikut proses seleksi. Pelaku pun menyuruh korban untuk menemuinya disebuah tempat di cikarang dan menyuruh korban membawa surat lamaran beserta uang untuk biaya masuk kerja, korban pun menemuinya dan menyerahkan surat lamaran kerja beserta uang yang di syaratkan.

kemudian korban di suruh pulang oleh pelaku dan menunggu kabar selanjutnya. Selang satu minggu korban tak kunjung mendapatkan informasi kelanjutan mengenai pekerjaan yang di janjikan oleh pelaku bahkan nomor handphone korban pun di blokir oleh pelaku, korban pun baru sadar bahwa dirinya telah di tipu korban menjadi trauma terhadap informasi lowowngan kerja yang ada di media sosial, korban tidak berani melapor polisi karna tidak tahu apa yang harus di perbuat korban pun hanya pasrah menghadapi kenyataan uangnya telah di bawa kabur oleh pelaku.

Hal yang dapat penulis simpulkan dari kasus diatas adalah jangan mudah percaya dengan segala bentuk lowongan kerja yang di share di media sosial lebih baik cari tahu dulu kebenarannya, agar tidak tertipu oleh pelaku kejahatan, dan cari lah informasi lowongan kerja di akun

resmi perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja/instansi – instansi terkait yang berpotensi menyalurkan tenaga kerja.

Kabupaten Karawang sebagai salah satu kota besar di Indonesia tentu tidak luput dari yang namanya tindak kejahatan. Dengan mudahnya akses menuju dunia teknologi informatika maka kejahatan *cyber crime* juga dengan mudahnya dapat dilakukan, contohnya saja penipuan lowongan kerja online. Kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok orang secara sadar. Pada dasarnya banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk mencegah dan memproses hukum tindak pidana penipuan online ini.

Upaya melakukan blokir kepada situs-situs yang menjadi arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga situs - situs penipuan ini dapat dihentikan, bahkan dengan cara menghukum pelaku tindak pidana penipuan online ini Menurut pendapat penulis kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana penipuan lowongan kerja ini di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sulitnya penegakan hukum dalam kasus penipuan lowongan kerja *online* ini.

Faktor Penyebab Kejahatan dan Seorang Menjadi Penjahat:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan dan sistem pendidikan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial juga karena memburuknya ketimpangan – ketimpangan sosial.

- c. Mengedornya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain – lain.
- e. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi.⁶

Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara *yuridis* dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dikategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos⁷.

Menurut Penulis yang seharusnya terjadi adalah Sarana Teknologi dan Informasi yang sudah maju dan berkembang seperti saat ini di manfaatkan dengan bijak sana, agar tidak terjadi hal – hal yang merugikan bagi orang lain. Seharunya perusahaan jika ingin mencari tenaga kerja meng *share* info lowongan kerja melalui Dinas Ketenaga Kerjaan agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menjanjikan masuk kerja di suatu perusahaan dengan membayar sejumlah uang.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Tinjauan Yuridis penipuan lowongan kerja Online untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Tinjauan Yuridis Penipuan Lowongan kerja Online yaitu :

⁶ Zarisnov Arafat, *Kriminologi*, FBIS Publishing, FBIS UBP Karawang 2018, hlm 19

⁷ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, Refika Aditama Bandung 2010, hlm 10

1. Tinjauan yuridis penipuan penawaran pekerjaan melalui media elektronik, oleh Olivia kakunsi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado Tahun 2012.
2. Tinjauan yuridis pembuktian *Cyber crime* dalam perspektif Hukum Positif Indonesia oleh Dwi Wiratama, bin fulan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Penipuan Lowongan kerja *Online* berdasarkan Perspektif Hukum Undang – Undang Nomor. 19 Tahun 2016 dan KUHP.

Perbedaan judul yang penulis angkat dengan 2 judul penelitian milik Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulagi Manado dan Universitas Brawijaya Malang, judul yang penulis angkat mengarah pada penipuan lowongan kerja yang dilakukan oleh oknum ketiga di kabupaten karawang.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Unsur – Unsur Penipuan pada lowongan kerja *online* menurut Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya menegakan hukum dan menanggulangi kejahatan penipuan lowongan kerja online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di angkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui unsur – unsur pidana penipuan lowongan kerja *online*
- b. Untuk memahami upaya menanggulangi tindak kejahatan penipuan lowongan kerja *online*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang di dapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang di cita – citakan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang di peroleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat di jadikan oleh parapraktisi hukum sebagai pertimbangan pembuktian tindak kejahatan, bahwa kejahatan lowongan kerja *online* dapat di pidanakan tanpa harus ada ke raguan bagi korban untuk melaporkan secara hukum para pelaku.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana penipuan secara online atau *cyber crime* yang kini marak terjadi merupakan salah satu bentuk tindak pidana dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi khususnya internet hal ini telah di buktikan dengan banyaknya masyarakat yang melamar pekerjaan

secara *online* yang menjadi korban dan mengalami kerugian atas kejahatan tidak penipuan lowongan kerja *online* tersebut.

Menurut H.P. Hoepnagels, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu melalui jalur *penal* (sanksi/hukuman pidana) dan *non penal* (di luar penegakan hukum pidana). Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus di lakukan dengan pendekatan integral yaitu adanya keseimbangan antara *penal* dan *non penal*⁸.

Berikut teori – teori yang di pakai sebagai landasan penelitian yang akan di lakukan :

Asas Legalitas

Asas Legalitas dalam hukum pidana merupakan Roh, merupakan atauran dasar yang sangat erat dengan pemberlakuan hukum pidana adapun di Indonesia termasuk didalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan. Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan ketentuan – ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Pidana yang telah ada.⁹

Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *Responsibility* atau *Criminal Liability*. Menurut Roeslan

⁸ *ibid.*

⁹ Moeljatno, *kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Jakarta 27 April 1976 Sinar Grafika.

Salah pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai di teruskan nya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk di pidana karena perbuatannya itu. Apa yang di maksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang di lakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang di larang.

Perbuatan yang di larang di maksud di sisni adalah perbuatan yang memang bertentangan atau di larang oleh hukum baik hukum *formil* maupun hukum *materil* sedangkan yang di maksud celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut.¹⁰

Teori Kepastian Hukum

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan kegiatan yang di perlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum di jalnkan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak nya dan bahwa purusan dapat di laksanakan.¹¹

¹⁰ Respository.umy.ac.id

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007 hlm. 160.

Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas – Asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan di larang dan di ancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan di tunjukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di tentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana nya di tunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian ini.¹²

Penipuan dalam KUHP

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Dengan rumusan pasal sebagai berikut :

¹² Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun¹³.

Penipuan dalam Undang – Undang ITE dan perubahannya:

Walaupun Undang – Undang ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE :

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, adapun sanksi pidana jika melanggar pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016 yaitu :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana di maksud

¹³ <http://hukum online.com>, 07 Oktober 2021, 21.42 WIB

dalam pasal 28 ayat (1) di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)¹⁴.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah Asas Legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme diciptakan sebagai akibat dari pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data penunjang adalah data Primer berupa studi lapangan.

¹⁴ Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 06 Oktober 2021, 23.00 wib

¹⁵ Hukum online, 05 Juli 2021, 14.00 wib

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap bentuk-bentuk penipuan lowongan kerja *online* dan modus operandinya, selanjutnya bentuk-bentuk *cyber crime* tersebut dianalisa untuk dikualifikasikan dan sedapat mungkin dicari pengaturannya di dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

- a. Menganalisa permasalahan yang diangkat menjadi Judul penelitian.
- b. Menganalisa Undang – Undang terkait yang mengarah pada permasalahan yang diangkat menjadi judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dikumpulkan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer Kitab Hukum Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang – Undng Nomor 11 Tahun 2008.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui Internet.

- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

Adapun sebagai data tambahan yang di butuhkan adalah data primer yang di peroleh dari :

- a. Wawancara yaitu dengan Koresponden korban penipuan lowongan pekerjaan *online* di Kabupaten Karawang.
- b. Wawancara yaitu dengan Koresponden dari Perusahaan penyalur tenaga kerja PT. Gokko Mirai Indonesia.

5. Analisis Data

Penalaran Hukum adalah proses penggunaan alasan – alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum. Yang diajukan dalam penalaran itu, dari kegiatan tersebut argumentasi pernyataan tersebut yang masing – masing disebut premis atau argumen.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Perpustakaan Nasional
3. Kediaman AL korban penipuan lowongan kerja online.